

IMPLEMENTASI PROGRAM JARINGAN ELEKTRONIK AKSES (JEKA) DATA CENTER DI KANTOR DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN JENEPONTO

Iqra syahnur^{1*}, Muhammad Tahir², Nasrul Haq³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the Electronic Access Network Program (JEKA) Data Center at the Office of Communication, Information and Statistics, Jeneponto Regency. This type of research is qualitative. The number of informants in this study were 5 people. The results of the research show that 1) aspects of Standards and policy objectives/measures and policy objectives are based on the objectives to be achieved by integrating data from OPD into the Electronic Access Network (JEKA) Data Center. 2) Resources; based on the number of ASN is sufficient, 3) The characteristics of implementing organizations in the process of implementing the Electronic Access Network Program (JEKA) Data Center are supported by excellent ASN performance, 4) Inter-organizational communication in the delivery to regional heads provides support, to each OPD as well as those responsible responsible for the program. 5) The disposition or attitude of the implementers; policy makers support and support the success of the Electronic Access Network Program (JEKA) Data Center can develop well in the future, 6) Environmental, economic, social and political socialization carried out through social media.

Keywords: implementation, program, jeka data center

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) Data Center di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 5 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 1) aspek Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan didasarkan pada sasaran yang ingin dicapai terintegrasinya data dari OPD ke dalam Jaringan Elektronik Akses (JEKA) Data Center. 2) Sumber daya; didasarkan jumlah ASN sudah mencukupi, 3) Karakteristik organisasi pelaksana pada proses Implementasi Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) Data Center didukung dari kinerja ASN yang sangat baik, 4) Komunikasi antar organisasi pada penyampaian kepada kepala daerah memberi support, kepada setiap OPD serta yang bertanggung jawab pada Program tersebut. 5) Disposisi atau sikap para pelaksana; para penentu kebijakan mendukung dan mensupport suksesnya Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) Data Center dapat berkembang baik kedepannya, 6) Lingkungan, ekonomi, sosial dan politik pada sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial.

Kata kunci: implementasi, program, jeka data center

* iqrasyahnur@gmail.com

PENDAHULUAN

Teknologi informasi sekarang telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data. Aktivitas ini menyebabkan beberapa sektor kehidupan telah memanfaatkan teknologi informasi yang ada seperti, *electronic education* (bidang pendidikan), *electronic commerce* (sektor perdagangan), *electronic health* (bidang kesehatan), serta *electronic government* (bidang pemerintahan) *smartphone* dan *mobile internet* serta perkembangan industri saat ini. Regulasi terkait penempatan data center di Indonesia ini tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Peraturan ini menyebutkan, penyedia layanan diwajibkan menempatkan data center dan *disaster recovery center* secara fisik di wilayah Indonesia.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto merupakan perangkat daerah yang baru dibentuk pada akhir 2016 dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Jeneponto. Salah satu target kinerja yang ingin dicapai adalah penguatan institusi lembaga pemerintah melakukan

pembangunan dalam proses penyajian data, informasi publik serta pengembangan *data center*.

Kondisi yang diharapkan adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto harus memiliki kemampuan dan kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dinamika dan kemajuan masyarakat, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan nasional dapat dicapai dengan baik. Selama ini terdapat kondisi yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan data dari berbagai *stake holder* dan institusi lainnya, sehingga ikut berdampak terhadap lemahnya penentuan program strategis pembangunan.

Atin Triwahyuni (2015) “Pengembangan Sistem Informasi *Data Center* Sebagai Penyedia Data Penyusunan Borang Akreditasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya sistem informasi *data center* borang akreditasi dapat memperbaiki pengolahan data borang dan dokumentasi yang tertata rapi.

Angga Prasetyo, Nunung Rohmatun (2015) “Implementasi Informasi Geografis dan *Data Center* Untuk Pemetaan Penyebaran Penyakit Demam Berdarah di Kabupaten Ponogoro”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan

informasi penyebaran penyakit menular diperlukan oleh beberapa pihak, seperti Dinas Kesehatan. Salah satu informasinya adalah mengenai penyebaran penderita demam berdarah dengan (DBD) secara spasial di Kabupaten Ponegoro. Keterbatasan pergerakan informasi menyebabkan penanganan serta proses antisipasi penyebaran di suatu daerah tertentu menjadi sangat lambat. Sistem informasi geografis (SIG) merupakan salah satu teknologi pemetaan secara geografis yang memadukan sentuhan sistem informasi. SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data spesial berikut atribut-atributnya, memodifikasi bentuk, warna, dan simbol. Proses penyimpanan dalam suatu basis data dan berhubungan dengan persoalan serta keadaan dunia nyata, memprediksi suatu hasil dan perencanaan strategis. Proses survey dan epidemiotologi pengamatan penyakit demam berdarah masih berdasar pada riwayat dan data pelaporan yang tidak real time, sehingga penanggulangan penyakit masih terkesan lambat.

Yuggo Afrianto, Ade Henri Hendrawan (2019). "Implementasi *Data Center* Untuk Penempatan *Host Server* Berbasis *Private Cloud Computing*". Berdasarkan hasil penelitian ini adalah sistem layanan *private cloud computing*

berbasis IaaS di *data center* kampus Universitas Ibn Khaldum (UIKA), dapat diterapkan menggunakan metode *hypervisor native bare metal* dan aplikasi *promox*. Hasil pengujian mengatakan bahwa *data center* berbasis IaaS secara sumber daya dapat menghemat, mengoptimalkan, dan pengelolaan sumber daya dari kebutuhan layanan sistem informasi yang harus disediakan kampus UIKA. Berdasarkan uji *usability* menunjukkan aplikasi *promox* telah sesuai dengan kebutuhan manajemen yang ada pada administrator IT kampus UIKA, yang memenuhi aspek *learnability*, *efficiency*, *memorability*, *errors*, dan *satisfaction*.

Implementasi adalah sesuatu untuk memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku dan dirumuskan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul setelah tersahkannya pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian. (Mazmanian dan Sabatier (1979) dalam Wahab 2012:135).

Van Meter dan Van Horn (1975) (dalam Winarno, 2014:149). Implementasi kebijakan adalah kegiatan

untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:21).

Edward III mengidentifikasi ada empat *critical factors* yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi. Keempat faktor tersebut adalah: komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:85). Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:85). (1) Komunikasi Secara umum Edward III membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*) (Winarno, 2014:178). Persyaratan pertama tentang transmisi dalam komunikasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan tersebut harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada setiap orang yang tepat sebelum keputusan- keputusan

kebijakan dan perintah-perintah tersebut di diikuti. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Yang kedua mengenai konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif maka perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Selanjutnya, mengenai kejelasan, jika kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan sebagaimana apa yang telah diharapkan, maka arahan pelaksanaan kepada pelaksana kebijakan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas bentuknya. (2) Sumber daya implementasi dalam kebijakan bisa jadi diteruskan dengan jelas dan konsisten kepada seorang pelaksana, tetapi jika seorang pelaksana kekurangan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan, maka implementasi cenderung tidak akan efektif.

Sumber daya merupakan faktor yang paling penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Yang dimaksud meliputi staf yang memiliki keahlian yang baik untuk melaksanakan kebijakan, wewenang dan fasilitas yang memadai guna melaksanakan kebijakan. Staf sepertinya merupakan sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Staf yang banyak belum tentu dapat melaksanakan kebijakan dengan baik, begitu pula dengan staf

yang sedikit. Sumber lain yang penting adalah wewenang. Setiap wewenang akan berbeda-beda dalam setiap kebijakan. Selanjutnya adalah mengenai fasilitas. Seorang pelaksana mungkin memiliki staf yang memadai dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya tetapi tanpa bangunan kantor untuk berkoordinasi, perlengkapan, perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi kebijakan tidak akan tercapai.

Disposisi dari pelaksana kebijakan merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Jika para pelaksana melakukan sikap baik dalam kebijakan, seperti halnya mendukung suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan dengan baik. Banyak kebijakan yang dilaksanakan dengan baik karena mendapat banyak dukungan dari pelaksana, namun ada pula kebijakan yang bertentangan dengan pandangan-pandangan pelaksana, kepentingan pribadi atau organisasi pelaksana. Jika kebijakan dilaksanakan kepada para pihak yang tidak mendukung, maka kesalahan-kesalahan tidak dapat dijelaskan, yakni adanya jarak antara keputusan kebijakan dan pencapaian kebijakan. (3) Struktur Birokrasi merupakan salah satu organisasi yang paling sering bahkan secara keseluruhan

menjadi pelaksana sebuah kebijakan. Birokrasi memiliki struktur yang dibuat untuk mencari solusi dalam setiap permasalahan masyarakat. Ada dua karakteristik utama birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut SOP dan fragmentasi (Winarno, 2014:206).

Implementasi sebagai tindakan yang administratif dan dapat diteliti pada satu tingkat program tertentu Grindle dalam Mulyadi (2015:47). Implementasi adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh beberapa individu atau pejabat serta kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Horn dalam Tahir (2014:55). Implementasi adalah perbedaan yang paling penting dalam suatu negara dengan negara yang lain dan tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara tersebut untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu juga dapat dilihat pada suatu kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah polibiro, kabinet atau presiden (Huntington dalam Mulyadi 2015:24).

Implementasi adalah kegiatan yang diarahkan pada suatu realisasi program. Dengan demikian suatu

implementasi merupakan sebuah proses dalam melaksanakan suatu rencana kebijakan yang berupa peraturan pemerintah maupun lembaga negara lainnya untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut, jadi implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Walaupun pemerintah membuat kebijakan yang sangat baik, tetapi belum diimplementasikan atau belum dilaksanakan dengan baik, maka kebijakan tersebut tidak berguna atau tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap kehidupan negara. (Gordon dalam Posolong dalam Mulyadi 2015:24). Ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99).

Implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk

mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi Wahyu dalam Mulyadi (2015:50). *Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete* maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai aktifitas yang beralian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil Pressman dan Wildavsky dalam Syahida (2014: 8-9).

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang Syaukani dkk dalam Pratama (2015:229). Implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan William (Taufik dan Isril, 2013:136). Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk

perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49). Implementasi adalah suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan baik teori Jones dalam Mulyadi (2015:45). Implementasi juga diartikan sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang sudah diprogramkan itu benar-benar memuaskan Lister dalam Taufik dan Isril (2013:136).

Definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu atau kelompok privat (swasta) dan publik yang telah langsung pada serangkaian pencapaian tujuan untuk terus-menerus dalam sebuah keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya Ekawati dalam Taufik dan Isril (2013:136). Implementasi juga dapat diartikan sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sebuah kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu Menurut Widodo dalam Syahida (2014:10).

Implementasi adalah persoalan yang mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan yang telah ditetapkan Naditya dkk (2013:1088).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis tipe studi deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemecahan masalah sehingga dalam palakasanaannya tidak terbatas pada pengumpulan data saja melainkan meliputi berbagai aspek analisis dan interpersi dari data tersebut. Dasar dalam penelitian ini berfokus pada adanya program jaringan elektronik akses (JEKA) *Data Center*.

Sumber data dalam penelitian ini adalah yaitu: (1) Data primier adalah pengumpulan oleh peneliti selama proses pengambilan data dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dan observasi. Untuk mendapatkan data primier maka penelitian ini maka peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa informan (2) Data sekunder merupakan di kumpulkan oleh peneliti selama proses pengambilan data dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dan observasi (3) Informan Penentuan informan data penelitian dilakukan dengan teknik

purposive sampling dimana penelitian digunakan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah dilakukan dan diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria dari informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki jabatan penting dalam kantor dan yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan.pada kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto. Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini adalah (1) Wawancara adalah percakapan antara dua orang dengan maksud tertentu dan bersifat mendalam. Diantara dua pihak tersebut terdapat pewawancara *interviewer* yang di wawancara *interview*. Tipe wawancara yang di gunakan ada dua yaitu, wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur (2) observasi adalah kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Dengan adanya observasi di harapkan untuk memperkuat dan membenarkan data yang terkumpul melalui teknik wawancara. Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto (3) Dokumentasi Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk arsip, dokumen, dan gambar yang berupa laporan serta

keterangan yang mampu mendukung penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015: 204).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi terkait penempatan data center di indonesia ini tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PTSE). Peraturan ini menyebutkan, penyedia layanan diwajibkan menempatkan data center dan disaster recovery center secara fisik diwilayah indonesia. Alhasil, penyelenggaraan sistem elektronik asing pun jadi harus berfikir dua kali apabila berencana melebarkan sayap ke pasar Indonesia. Implementasi Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center* di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu faktor utama yang harus dimiliki oleh setiap pegawai, karena Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center* dijadikan sebagai program pemenuhan data yang berbasis terintegrasi dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jeneponto. Ketersedian server di organisasi perangkat daerah (OPD) ini memberikan banyak manfaat banyak bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki aplikasi website kerana fasilitas ini sudah diberikan kepada

seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan hosting/penyimpanan data server yang tersedia Di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto.

Keterbukaan informasi data-data yang bisa diakses masyarakat dan disebarluaskan ke masyarakat itu terkandung dalam undang-undang republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Adapun dampak terhadap kinerja pemerintahan dan terhadap layanan dasar dapat diuraikan yakni, menjadikan local government sebagai pengelola dan koordinator jaringan telematika dan pusat data base daerah dimana semua lembaga atau instansi baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat inter koneksi dalam satu *Network Operating Center* (NOC), serta adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan budaya informasi dapat disignifikan. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana telematika yang sesuai dengan perundang-undangan, pengembangan infrastruktur telematika sampai setiap perangkat daerah sehingga penjangkaran data dapat

dilakukan secara *online* dalam waktu relatif cepat dan efisien. Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitran media massa dalam rangka meningkatkan potensi data daerah, pengembangan konten *website* yang meliputi sistem aplikasi perangkat daerah baik intranet maupun internet sebagai pusat pedoman aplikasi data perangkat daerah, pengembangan implementasi *e-government* di lingkungan, adanya upaya penyediaan jaringan komunikasi data terintegrasi dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintahan. Untuk melihat Implementasi Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center* di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto, maka peneliti mengangka beberapa indikator menurut van meter dan van horn (1975) dalam buku Hill and Hupe (2008 : 47) yaitu Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, Disposisi atau Sikap para pelaksana, Lingkungan, ekonomi, sosial dan politik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan berikut:

Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standard dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas kepentingan ketercapaian standard dan sasaran tersebut. Implementasi yang efektif memerlukan standard dan tujuan program program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Van Meter Dan Van Horn (sulaieman 1998).

Maka perlu melibatkan sasaran dan tujuan yang konsisten dengan maksud sasaran yang ingi dicapai tentang Implementasi Program Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center* di Kantor Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto. Sasaran yang akan dicapai dalam Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center* ini adanya keterbukaan informasi terkait informasi organisasi perangkat daerah (OPD) kepada masyarakat untuk memudahkan dalam mengakses website. Dalam hal ini Perosalan data tentang tupoksi adalah urusan leading sektor Dinas Komunikasi Informatika

dan Statistik yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan data terkait dengan tupoksi. tetapi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik mengusahakan untuk mengumpulkan semua data meskipun masih banyak kendala yang dihadapi seperti ada beberapa data yang ditanyakan dengan pegawai tidak sesuai dengan tugasnya.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang ditetapkan secara apolitik Van Meter dan Varn Horn (dalam widodo 1974).

Dalam hal ini jumlah pegawai atau ASN yang ada pada kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto sudah mencukupi tetapi nantinya masih akan merekrut beberapa pegawai lagi dan mengenai sumber daya finansial atau anggaran yang digunakan oleh disnas komunikasi informatika dan statistik kabupaten jeneponto bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto setiap tahunnya dan dana alokasi alokasi umum Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, maka pembahasan ini tidak bisa lepas struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma dan pola hunungan yang mempunyai hunungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang dimereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Van Meter dan Van Horn (1975).

Mengenai karakteristik pelaksana dalam proses implementasi program jeka data center dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur atau pegawai kantor Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Jeneponto sudah cukup baik dan dapat mendukung terlaksannya dan terselenggranya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari

Program Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center*. Kemudian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto memiliki tim aplikasi dan tim jaringan yang telah dipercayakan dalam menangani proses Implementasi Program Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center*.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksana

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut van Meter Dan Van Horn (dalam widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan yang harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Mengenai komunikasi organisasi terkait dengan pelaksana, dalam proses Implementasi Proram Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center* dapat disimpulkan bahwa adanya komunikasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan kepala daerah Kabupaten Jeneponto sangat mendukung dan mensupport adanya program ini. Serta di komunikasikan langsung kepada

setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada pada Kabupaten Jeneponto apa-apa program baru yang telah dilakukan dan apa-apa mau dikembangkan kedepannya, dalam proses implementasi Program Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center* ini yang tentunya dalam hal ini bapak kepala dinas dan bapak kepala bidang aplikasi dan informatika yang bertanggung jawab dalam pengimplementasian Program Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center*.

Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Disposisi merupakan komitmen dan sikap aparat pelaksana terhadap program, terkhusus dari mereka yang menjadi pelaksana dari program, terutama dalam hal aparatur birokrasi. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang bagus, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti keinginan para pembuat kebijakan atau program, akan tetapi apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif Edward III (Agustino, 2008).

Variebel ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana terhadap juridis dimana kebijakan disampaikan,

dalam hal ini respon pelaksana terhadap Program Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center* ini sangat mendukung dan mensupport dengan adanya program ini dan dapat benar-benar berkembang baik kedepannya dengan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat, kemudian para pelaksana sudah megupayakan agar data-data dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bisa terintegrasi ke dalam Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center*. Meskipun masih memiliki hambatan terbatasnya pengelola yang dimiliki, terbatasnya anggaran, masih ada beberapa OPD yang belum memberikan data-data sehingga tiak memaksimal kinerja pegawai dan adanya koneksi yang belum bagus antara organisasi satu dengan lainnya.

Lingkungan, Ekonomi, Sosial dan Politik

Implemetasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik. Pengaruh faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana Program Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center* di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto. Proses

politik tidak dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses menegenai aksi administrasi yang dapat diteliti pada tingkat program tersebut (Akib 2012).

Secara ekonomi, sosial dan politik, jika dilihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Jeneponto melakukan sosialisasi ketika ada rapat koordinasi, media sosial, radio dan ketika ada kegiatan musrembang itu dilakukan dalam rangka memperkenalkan Program Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center* atau program-program lainnya. Serta tahun 2019 telah mengikuti kompotisi tingkat provinsi yaitu *event Innovation government award* (IGA) 2019 tetapi belum memenuhi syarat tetapi sempat memasuki tiga besar se Sulawesi Selatan untuk tata kelola pemerintahan. Serta adanya dukungan dukungan dari pimpinan daerah serta anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dalam pembuatan Program Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center*. Selain itu faktor ekonomi sangat mendukung dengan adanya penggunaa anggaran (PAGU) yang diberikan oleh Kabupaten Jeneponto dan dialokasikan kepada Program Program Jaringan

Elektronik Akses (JEKA) *Data Center*) *Data Center*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai topik permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana yang telah dijabarkan dan dijelaskan mengenai secara Implementasi Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center* Di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sasaran yang ingin dicapai keterbukaan informasi kepada seluruh seluruh masyarakat yang ada Kabupeten Jeneponto yang nantinya disajikan ke dalam Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center*. (2) Sumber daya, jika dilihat dari sumber daya manusia dan sumber daya finansial sudah cukup baik, tetapi mengenai pelatihan masih belum dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam mengembangka Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center*. (3) Karakteristik organisasi pelaksana, untuk faktor ini juga sudah cukup baik meskipun masih ada salah satu dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang lambat

memasukkan data dan ini menjadi kenadala. (4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, faktor ini sudah cukup baik dengan adanya komunikasi kepada kepala daerah serta seluruh organisasi perangkat daerah. (5) Disposisi atau Sikap para pelaksana, sikap para pelaksana sangat mendukung dan mensupport baik dengan adanya program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) *Data Center* (JEKA) *Data Center*. (6) Lingkungan, ekonomi, sosial dan politik, sebaliknya. Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sosialisasi sudah dilakukan dengan ketika dilakukan rapat dikantor daerah, melalui media sosial, serta radio.

DAFTAR PUSTAKA

- Triwahyuni A. (2014). *Pengembangan Sistem Informasi Data Center Sebagai Penyedia Data Penyusunan Borang Akreditasi. Telematika, 11(1)*.
- Afrianto, Y. & Adi, H. H. (2019). *Implementasi Data Center Untuk Penempatan Host Server Berbasis Private Cloud Computing. Krea-TIF: Jurnal Teknik Informatika, 7(1)*.
- Prasetyo, A. & Nunung, R. (2015). *Implementasi Sistem Informasi Geografis dan Data Center Untuk Pemetaan Penyebaran Penyakit Demam Berdarah di Kabupaten Ponogoro. Multitek Indonesia, 9(1)*.
- Nuridin Usman. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung: CV. Sinar
- Haryati Siska, Aji Sudarsono, & Eko Suryana. (2015). *Implementasi Data Mining Untuk Memprediksi Masa Studi Mahasiswa Menggunakan Algoritma C4. 5 (Studi Kasus: Universitas Dehasen Bengkulu). Jurnal Media Infotama Vol.11 No. 2.*
- Itok Saswito. (2014). *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Didesa Tabing Kecamatan Kota Kampar Hulu Kabupaten Kampar (Skripsi, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Masriani. (2017). *Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Anak-Anak Pengemis Di Kecamatan Mandau (Skripsi, Universitas Riau)*.
- Haryati I, Aji Sudarsono, & Eko Suryana. (2015). *Implementasi Data Mining Untuk Memprediksi Masa Studi Mahasiswa Menggunakan Algoritma C4. 5 (Studi Kasus: Universitas Dehasen Bengkulu). Jurnal Media Infotama, 11(2)*.
- Desy. P. (2017). *Implementasi Perda Purbalinga Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dikabupaten Purbalingga (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwakerto)*.
- Horn. C.V., & Donal Van Meter. (1975). *Model-Model Dalam Kebijakan Implementasi*. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 *Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*